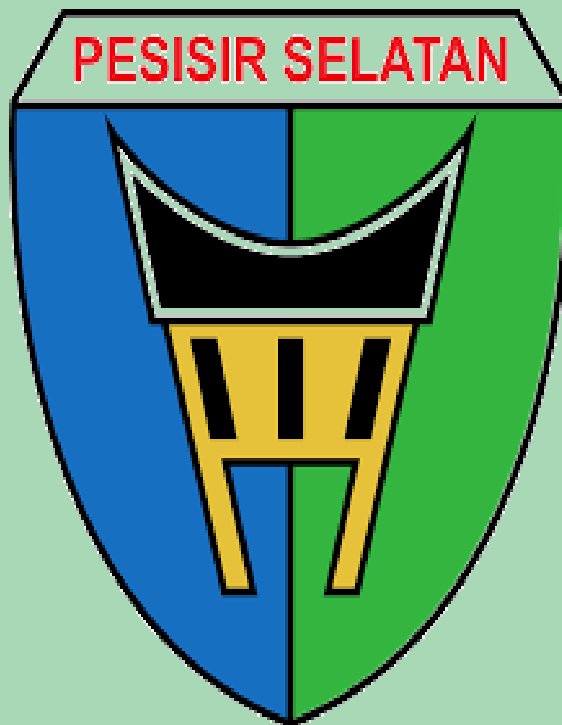


RENCANA KERJA TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target

kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2022;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan seluruh administrasi Perangkat Daerah	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
2	16	01	2.02		Kegiatan Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi Keuangan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%

					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pelaksanaan operasional kendaraan dinas	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2	16	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik										
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	02	2.01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya sosialisasi Perda tentang SPBE	90 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	90 orang	0	0	
2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan informasi publik	5000 DIP	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 DIP	5000 DIP	100%	
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Terbinanya KIM se Kab.Pessel dan terpublishnya berita di website	15 Kecamatan dan 3000 berita	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Kecamatan dan 3000 berita	15 Kecamatan dan 3000 berita	100%	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika										
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan e government Pemda	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	
2	16	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya data aplikasi yang akan disertifikasi	10 Buku dan 1 Perbup	n/a	n/a	n/a	n/a	10 buku dan 1 Perbup	0	0	
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Terlaksananya Pengembangan dan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	

					Kabupaten/kota Cerdas dan Kota Cerdas	pengelolaan ekosistem											
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
2	16	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Terselenggaranya statistik sektoral di pemda Pesisir Selatan											
2	16	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Tersedianya data statistik sektoral Pemda Pesisir Selatan	362 buku	n/a	n/a	n/a	n/a	261 buku	261 buku	100%			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggarakannya pengamanan persandi Pemda Kab.Pesisir Selatan											
2	21	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%			
1.02.1.02.10.01.01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a			
1.02.1.02.10.01.02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Kegiatan operasional perjalanan dinas kantor	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a			
1.02.1.02.10.01.15					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya pelayanan berbasis Teknologi informasi terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku	n/a	n/a	120 ASN	120 ASN	100%	n/a	n/a	n/a			
1.02.1.02.10.01.17					Program Fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tercapainya peningkatan SDM ASN dan masyarakat dalam	n/a	45 OPD dan 182 Nagari	45 OPD dan 182 Nagari	45 OPD dan 182 Nagari	100%	n/a	n/a	n/a			

		pemanfaatan TIK Guna peningkatan kemampuan bekerja dan frmeningkatkan kesejahteraan								
1.02.1.02.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tercapainya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kab. Pessel	n/a	3.060 Berita dan 45 Sub Website OPD	3000 Berita website, 120 artikel website dan 15 Media elektronik	3000 Berita website, 120 artikel website dan 15 Media elektronik	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.20	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tercapainya penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Pessel	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tercapainya penyelenggaraan sisitem pemerintah berbasis elektronik (e-Government) pemerintah Kab. Pessel	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.22	Program Pengamanan Informasi	Terlaksananya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.14.1.02.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Terlaksananya ketersediaan informasi dan data statistik daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sebanyak 10 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 3.975.674.041,00 (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 3.903.565.594,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 98%.

1. Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 149.400.000,- dengan target 12 bulan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 127.825.877,- dengan capaian kinerja 100%

B. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi. Kegiatan ini dianggarkan sebesar 86.225.000,- dengan target 45 OPD dan 182 Nagari. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi Rp. 0,- dengan capaian kinerja 0%

2. Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 88.320.000,- dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 88.320.000,- dengan capaian kinerja 100%

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.279.445,- dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 48.279.445,- dengan capaian kinerja 100%

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.772.600,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 45.772.600,- dengan capaian kinerja 100%

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.807.500,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 12.260.000,-dengan capaian kinerja 96%

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.665.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 8.640.000,-dengan capaian kinerja 100%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,-dengan capaian kinerja 100%

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.588.500,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 20.866.000,-dengan capaian kinerja 97%

h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.283.348,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 28.158.348,-dengan capaian kinerja 100%

i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.150.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 30.025.000,-dengan capaian kinerja 100%

j. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.493.700,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 8.403.700,-dengan capaian kinerja 99%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 142.770.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 136.045.100,-dengan capaian kinerja 95%

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31.887.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 31.862.000,-dengan capaian kinerja 100%

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.418.250,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 3.418.250,-dengan capaian kinerja 100%

4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.137.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 147.275.000,-dengan capaian kinerja 98%

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.577.500,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 148.316.525,-dengan capaian kinerja 100%

b. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 261.437.500,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 249.231.035,-dengan capaian kinerja 95%

c. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.700.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 13.647.500,-dengan capaian kinerja 95%

6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.683.290.198,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 2.666.552.044,-dengan capaian kinerja 99%

7. Program Pengamanan Informasi

a. Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.16.065.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 15.347.700,-dengan capaian kinerja 96%

8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a. Penyediaan Data Statistik Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.167.500,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 39.168.900,-dengan capaian kinerja 98%

9. Program Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah

a. Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.519.000,-dengan target 12 bulan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 1.519.000,-dengan capaian kinerja 100%

3. Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun 2020

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

➤jumlah biaya listrik yang tidak konsisten perbulannya sehingga menyebabkan kegiatan penyediaan sumberdaya air dan listrik mengalami kelebihan anggaran

➤Adanya refocusing anggaran sehingga ada 1 kegiatan yang dihilangkan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Untuk urusan Komunikasi dan Informatika, Diskominfo masih mempunyai pekerjaan yang masih belum terselesaikan yaitu tentang keterbukaan informasi publik dan SPBE. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE; adalah pekerjaan yang harus dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikutn ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi			3,34	3,34	3,2	3,35	3,34		3,2	3,34	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik			93	93	94	95	99		94	95	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan.
2. Kurangnya SDM dari masyarakat tentang Teknologi Informatika
3. Kurangnya Aparatur yang memiliki kemampuan tentang Komunikasi dan teknologi informasi.
4. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok Informasi Masyarakat .
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengakses informasi pembangunan daerah
6. Kurang mampunya masyarakat dalam pemanfaatan akses komunikasi dan informatika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan infromatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Era Otonomi Daerah agar dapat didayagunakan secara optimal melalui Bidang Komunikasi dan Informatika.

Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang berperan membantu dalam menangani bidang Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan Misi Kepala Daerah yaitu ***“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih, responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat”***. Makna yang terkandung dalam Misi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan misi Bupati sebagai berikut :

- a. Mewujudnya smart city bagi masyarakat Pesisir Selatan.
- b. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan komunikasi dan informatika.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam bentuk kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pemantauan dan evaluasi.
- e. Mengoptimalkan pembinaan kemandirian kelompok informasi di lapangan.
- f. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menginformasikan pembangunan daerah.
- g. Meningkatkan kemampuan aparat, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses komunikasi dan informatika.
- h. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat nagari.
- i. Meningkatkan mutu data statistik lintas sektoral dalam menyajikan informasi pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat.
2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika secara professional.
3. Meningkatnya peran Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinergisitas program dan kegiatan antara Dinas/ Badan yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Meningkatkan akses jaringan data informasi yang digunakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
6					PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Kegiatan				
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6	1		0		<u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMINFO	Tersedianya Gaji ASN	100%	3.132.500,00
6	1		0	1					
				2					
2	1	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISKOMINFO	Tersedianya Tunjangan Pelaksanaan Kegiatan	100%	94.800,00
6	1		0	2					
					Kegiatan				
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6	1		0		<u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMINFO	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	100%	10.500,00
6	1		0	1					
				6					

2	1	0	2.	0					
6	1	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMINFO	Terlaksananya pengadaan : - Komputer, laptop, Printer, AC - Meja, Kursi, Filling Kabinet, Kursi tamu, dll	100%	29.150,00
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMINFO	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan perlengkapan dinas lainnya	100%	36.180,00
6	1	0	0	4					
2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISKOMINFO	- Tersedianya barang cetakan - Tersedianya pengadaan dokumen	100%	30.000,00
6	1	0	0	5					
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISKOMINFO	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5.400,00
6	1	0	0	6					
2	1	0	2.	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	DISKOMINFO	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	100%	22.800,00
6	1	0	0	8					
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	DISKOMINFO	Tersedianya Mobilitas Sarana Kendaraan dan Rapat-rapat Dinas	100%	177.625,00
6	1	0	0	9					
2	1	0	2.	0	Kegiatan				
6	1	0	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	1	0	2.	0	<u>Sub Kegiatan</u>				
6	1	0	0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	100%	300.000,00
2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	Tersedianya peralatan dan mesin kantor : - Access Door	100%	10.000,00
6	1	0	0	6					
2	1	0	2.	0	Kegiatan				
6	1	0	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

2	1	0	2.	0	<u>Sub Kegiatan</u>	DISKOMINFO	Terlaksananya pembayaran rekening	100%	140.300,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
6	1	0	0	2			- Listrik		
			8				- Air		
							- Telfon		
							- dll		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISKOMINFO	Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan kantor	100%	58.900,00
6	1	0	0	4					
			8						
					Kegiatan				
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
6	1	0	0		Penunjang Urusan				
			9		Pemerintahan Daerah				
					<u>Sub Kegiatan</u>				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	-Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	160.180,00
6	1	0	0	2			- Pembayaran pajak kendaraan dinas		
			9						
2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	DISKOMINFO	Terpeliharanya sarana dan prasana pendukung	100%	18.200,00
6	1	0	0	1	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor dan bangunan		
			9						
2	1	0			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
6	2				Kegiatan				
2	1	0	2.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
6	2	0	0		<u>Sub Kegiatan</u>				
			1						
2	1	0	2.	0	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya Sosialisasi tentang Regulasi TIK	100%	80.500,00
6	2	0	0	1			- 3 x 30 Orang		
			1		Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Pessel	Terlaksananya Penanganan Komunikasi Krisis	100%	60.000,00
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya Pemantauan Isu Publik di Media Massa	100%	60.000,00

2	1	0	2.	0				
6	2		0	5				
			1		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pessel	dan Media Sosial	
								100%
							Terlaksananya kegiatan :	221.500,00
							- Operasional LPPL Radio	
							Langkisau 12 bulan	
							- Operasional Mupen 12	
							bulan	
							- 12 kali diseminasi	
							infomasi pemerintah	
							daerah melalui mobil	
							keliling	
2	1	0	2.	0	Pelayanan Informasi Publik			
6	2		0	6				
			1			Kab. Pessel	Terlaksananya keterbukaan	
							informasi publik di 45	
							Perangkat Daerah, 182	
							Nagari, 15 Sekolah, BUMD,	
							dan Pemeringkatan	100%
							Keterbukaan Informasi	200.230,00
							Publik untuk Tingkat	
							Kabupaten dan Tingkat	
							Provinsi	
2	1	0	2.	1	Penyelenggaraan Hubungan			
6	2		0	2	Masyarakat, Media dan	Kab. Pessel	Terlaksananya Pembinaan	
			1		Kemitraan Komunitas		terhadap kelompok	100%
							informasi masyarakat :	280.600,00
							- 15 KIM (Media	
							Tradisional)	
							- Pemeringkatan Media	
							Tradisional tingkat	
							Kabupaten dan Provinsi	
							- Website dan Media Online	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN			
6	3				APLIKASI INFORMATIKA			
					Kegiatan			
2	1	0	2.		Pengelolaan <i>e-government</i> di			
6	3		0		Lingkup Pemerintah			
			2		Daerah Kabupaten/Kota			
					<u>Sub Kegiatan</u>			
2	1	0	2.	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-</i>			
6	3		0	1	<i>government</i> dalam Penyelenggaraan	Kab. Pessel	Terlaksananya	
			2		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		penyelenggaraan	100%
							eGovernment Pemerintah	45.000,00
							Daerah	
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi			
6	3		0	4	Intra Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	Tersedianya Sarana	
			2				Prasarana Penunjang Sistem	100%
							Komunikasi Intra Pemerintah	3.450.000,00

2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pessel	Tersedianya Data Statistik Daerah : - PSDA 250 Buku - KDA 510 Buku - PDRB 60 Buku - PDRB - Nagari Statistik	100%	150.000,00
2	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Pessel		100%	45.000,00
2	2	0	2.	0	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Pessel		100%	90.000,00
2	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Pessel		100%	80.000,00
2	2	0	2.	0	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Pessel		100%	60.000,00
2	2	0	2.	0	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Pessel		100%	80.000,00
2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN				
2	2	0			BIDANG PERSANDIAN				
2	2	1			PROGRAM				
2	2	1			PENYELENGGARAAN				
2	2	1			PERSANDIAN UNTUK				
2	2	1			PENGAMANAN INFORMASI				
2	2	1			Kegiatan				
2	2	1			Penyelenggaraan Persandian untuk				
2	2	1			Pengamanan				
2	2	1			Informasi Pemerintah Daerah				
2	2	1			Kabupaten/Kota				
2	2	1			Sub Kegiatan				
2	2	1			Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Keamanan Informasi - Rencana Induk, Arsitektur Keamanan Informasi - Peta Rencana Strategis Keamanan Informasi	100%	75.000,00

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Adanya Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keamanan TIK umum dan khusus	100%	80.000,00
1	2		0	2					
			1						
2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Pessel	Terciptanya Keamanan dan Sistem Informasi Elektronik	100%	80.000,00
1	2		0	3					
			1						
2	2	0	2.	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Terlaksananya Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengaman informasi	100%	65.000,00
1	2		0	4					
			1						
					J U M L A H				14.027.365,00

BAB V

PENUTUP

Hasil evaluasi atas Renja Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99% atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Diskominfo yang telah dituangkan dalam Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

The image shows an official purple circular stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp contains the text "BUPATI PESIR SELATAN," at the top and "Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

